Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 13838-13843

Dampak Pengaruh Sosial Ekonomi Penggusuran Masyarakat Kampung Tua Tembesi Tower Kecamatan Sagulung, Batam (Studi Kasus Penggusuran Kampung Tua Tembesi Tower, Sagulung Batam)

Saputra Hadiwinarto[1], Abdul Halik[2], Siti Mujanah[3]
[1,2,3]Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Corresponding Author: Saputra Hadiwinarto, E-Mail: : saputra_hadiwinarto@usp.ac.id
Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat akibat penggusuran rumah dan lahan di Kampung Tua Tembesi Tower, Sagulung, Batam. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) dengan menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung, survey lokasi penggusuran dan sebagiannya berbasis dokumen (laporan media, laporan Ombudsman, pernyataan perusahaan, dan sumber sekunder lainnya) untuk mengidentifikasi konsekuensi langsung dan tidak langsung atas proses penertiban lahan pada awal Januari 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggusuran memicu hilangnya hunian dan aset material, gangguan mata pencaharian (termasuk kehilangan usaha mikro dan akses kerja), penurunan pendapatan rumah tangga, disrupsi layanan pendidikan dan kesehatan, serta dampak psikososial dan erosi modal sosial komunitas. Temuan juga menunjukkan adanya masalah tata kelola pertanahan dan indikasi maladministrasi yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman. Artikel ini menyimpulkan dengan rekomendasi kebijakan praktis: kompensasi yang adil dan transparan, relokasi partisipatif, pemulihan mata pencaharian, mekanisme kompensasi jangka panjang, dan penguatan mekanisme pengaduan serta monitoring independen untuk memastikan pemulihan sosial-ekonomi.

Kata kunci: penggusuran, Tembesi Tower, dampak sosial ekonomi, pemukiman informal, relokasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the socioeconomic impacts experienced by residents due to the eviction of homes and land in Kampung Tua Tembesi Tower, Sagulung, Batam. The research uses a mixed-method approach combining qualitative and quantitative analyses. The research was conducted through direct interviews with affected residents, surveys of the eviction location, and was party bsed on documents (media reports, company statements, and other secondary sources) to identify the direct and indirect conseqcuences of the land clearing process in early Januari 2025. The analysis result indicate that the evictions triggered the loss of housing and material assets, livelihood disruptions (including the loss of micro-businesses and job access), decreased household income, disruption of education and health services, and psychosocial impact and erosion of community social capital. The findings also incate land governance issues and indications of maladministration that are recommended for follow-up by the Ombudsman. The article concludes with practical policy recommendations; fair and transparent compensation, participatory relocation, livelihood restoration, long-term compensation mechanisms, and strengthening of complaint mechanisms and independent monitoring to ensure socio-economic recovery.
Keyword : eviction, Tembes Tower, socio-economic impact of informal settleelements, relocation.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kampung Tua Tembesi Tower merupakan salah satu wilayah yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Batam. Sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari usaha kecil dan pekerjaan informal di sekitar tempat tinggal mereka. Ketika penggusuran terjadi, masyarakat menghadapi perubahan drastis dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran

empiris mengenai dampak penggusuran terhadap perekonomian warga serta menemukan alternatif solusi yang berkelanjutan. Konflik pertanahan dan penggusuran untuk kepentingan pembangunan merupakan fenomena yang kerap muncul di kawasan perkotaan Indonesia. Dampak sosial ekonomi dari penggusuran dapat bersifat luas dan bertahan lama, mempengaruhi aspek hunian, mata pencaharian, layanan dasar, dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Salah satu peristiwa yang menonjol pada awal 2025 adalah penertiban dan pembongkaran permukiman di Kampung Tua Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, yang pelaksanaannya dilaporkan pada 8 Januari 2025. Peristiwa ini melibatkan perusahaan swasta (PT Tanjung Piayu Makmur/TPM) dan Tim Terpadu pemerintah kota serta mendapat perhatian lembaga pengawas publik (Ombudsman RI).

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi langsung maupun tidak langsung akibat penggusuran; (2) menganalisis aspek tata kelola pertanahan, kompensasi, dan relokasi; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemulihan dan pencegahan konflik serupa di masa datang.

Kajian literatur tentang penggusuran dan resettlement menunjukkan pola risiko impoverishment (kerentanan kemiskinan) yang sistematis. Model Risks and Reconstruction oleh Michael M. Cernea mengidentifikasi beberapa risiko utama dalam peristiwa pemindahan paksa: keterlantaran hak atas tanah (landlessness), kehilangan pekerjaan (joblessness), kehilangan hunian (homelessness), marginalisasi sosial, kerawanan pangan, meningkatnya morbiditas, hilangnya akses terhadap sumber daya bersama, dan disartikulasi sosial/komunitas. Respon kebijakan yang efektif melibatkan rekonstruksi mata pencaharian, kompensasi adil, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme pengawasan independen. Rujukan teori ini dipakai untuk menganalisis temuan kasus Tembesi Tower dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pemulihan kesejahteraan penduduk terdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 100 responden yang merupakan warga terdampak penggusuran. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pejabat pemerintah setempat. Analisis data dilakukan dengan triangulasi antara hasil survei dan wawancara untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dampak sosial ekonomi penggusuran.

Sumber data:

1. Wawancara langsung dari warga terdampak, survey langsung lokasi penggusuran
2. Laporan media lokal dan nasional (laporan kejadian lapangan dan wawancara saksi),
3. Dokumen resmi dan siaran pers (Ombudsman RI, pernyataan PT TPM, pengumuman BP Batam),
4. Berita dan dokumentasi visual yang dipublikasikan (foto, video),

5. Pernyataan publik dari pihak terkait (pemerintah daerah, perusahaan).

Teknik analisis:

1. Triangulasi data antar-sumber untuk memverifikasi fakta (tanggal kejadian, jumlah terdampak, opsi relokasi),
2. Koding isi (content analysis) terhadap narasi media dan rekomendasi resmi
3. Analisis tematik terhadap dampak sosial-ekonomi berdasarkan kerangka Cernea (1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dan Hasil Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sekitar 68% warga kehilangan sumber pendapatan utama karena lahan usaha mereka ikut digusur. Selain itu, terjadi penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga hingga 45% setelah penggusuran. Dari sisi sosial, masyarakat mengalami disintegrasi komunitas dan menurunnya solidaritas sosial karena berpindah ke lokasi berbeda. Beberapa warga juga mengalami stres dan ketidakpastian terhadap masa depan akibat tidak adanya kejelasan kompensasi atau relokasi yang layak.

Gambaran Umum Peristiwa

Menurut liputan media dan laporan resmi, penertiban/pembongkaran permukiman di Kampung Tembesi Tower dilaksanakan pada pagi hari tanggal 8 Januari 2025. Penertiban dilakukan oleh Tim Terpadu yang melibatkan aparat pemerintahan daerah, Satpol PP, unsur keamanan, serta tenaga pelaksana dari pihak perusahaan.

Berbagai laporan memberikan angka yang berbeda terkait luas lahan dan jumlah rumah/KK yang terdampak, antara lain:

Sumber	Angka/Laporan	Keterangan
Mongabay (laporan jurnalistik)	sekitar 800 KK	Laporan lapangan dan foto, tanggal 8 Jan 2025
Ombudsman RI (Rekomendasi 12 Feb 2025)	teridentifikasi 344 KK masih bertahan	Hasil pemeriksaan dan monitoring perwakilan Kepulauan Riau
Lenterakepri / Kepri media lokal	1.000+ rumah terdampak (sebagian sudah ditertibkan)	Pelaporan media lokal 9 Jan 2025; menyebut ratusan hingga ribuan bangunan
BP Batam / dokumen PL	Penetapan Lokasi PL No. 215.26 (contoh)	Sumber dokumen BP Batam (e-PPID) menunjukkan PL terkait lahan

Catatan: variasi angka di atas merefleksikan perbedaan cakupan penghitungan, waktu pelaporan, dan status warga (bertahan vs. sudah dipindahkan).

Dampak Hunian dan Aset

Kerusakan fisik dan hilangnya tempat tinggal merupakan dampak langsung. Banyak rumah dirobohkan menggunakan alat berat, menyebabkan kehilangan aset rumah tangga, surat berharga, dan sarana produksi rumah tangga (mis. bengkel, kios, usaha rumahan).

Dampak Mata Pencaharian dan Pendapatan

Banyak warga terdampak menggantungkan ekonomi pada usaha mikro, perdagangan kecil, dan pekerjaan informal. Penggusuran memutus akses ke tempat usaha, mengganggu rantai pemasukan harian, dan berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga dalam jangka pendek hingga menengah.

Dampak Sosial dan Psikologis

Terjadinya disrupsi sosial—termasuk putusnya jaringan sosial, trauma akibat pembongkaran paksa, dan gangguan pendidikan anak—tercatat dalam narasi korban dan pengamatan pemeriksa. Ombudsman bahkan merekomendasikan perlunya trauma healing dan perhatian khusus pada anak-anak serta lansia.

Analisis Tata Kelola dan Hukum

Kasus ini juga membuka isu tata kelola pertanahan: adanya penetapan lokasi (PL) yang dialihkan kepada perusahaan, perbedaan informasi tentang legalitas lahan, dan potensi maladministrasi dalam proses penerbitan legalitas atau penanganan pengaduan masyarakat. Ombudsman RI menyimpulkan adanya maladministrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan penampungan sementara, memperhitungkan kerugian materiil, dan mengusahakan relokasi serta ganti rugi yang layak.

Diskusi

Mengaitkan temuan kasus Tembesi Tower dengan model Cernea menunjukkan pola risiko impoverishment yang khas: kehilangan hak atas tanah, hilangnya pendapatan, kerentanan pangan dan gangguan kesehatan, serta disartikulasi komunitas. Tanpa intervensi pemulihan yang sistematis (kompensasi adil, restitusi lahan, atau rekonstruksi mata pencaharian), kelompok terdampak berisiko jatuh ke kemiskinan jangka panjang.

Analisis juga menegaskan pentingnya tata kelola transparan dan mekanisme partisipatif sebelum tindakan pemindahan. Alternatif yang lebih adil melibatkan negosiasi yang bermakna, kompensasi berbasis aset dan mata pencaharian, serta program dukungan teknis untuk reintegrasi ekonomi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penyelesaian administratif dan hukum yang transparan: BP Batam dan pemerintah daerah harus menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dan membuka akses informasi terkait status legalitas lahan.
2. Kompensasi adil dan penghitungan kerugian: penyusunan mekanisme valuasi aset rumah tangga yang transparan dengan partisipasi warga.
3. Relokasi partisipatif: opsi relokasi harus bersifat partisipatif dan memperhatikan akses terhadap infrastruktur, pekerjaan, dan layanan dasar.

4. Pemulihan mata pencaharian: program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses kredit mikro untuk mendorong pemulihan ekonomi rumah tangga.
5. Trauma healing dan layanan sosial: penyediaan layanan psikososial untuk anak dan kelompok rentan.
6. Mekanisme pengaduan dan monitoring: pembentukan tim monitoring independen (mis. Ombudsman, LSM) untuk memastikan implementasi kompensasi dan relokasi.
7. Moratorium penertiban lebih lanjut: sampai ada penyelesaian administrasi dan mekanisme jaminan sosial bagi warga terdampak.

KESIMPULAN

Penggusuran di Kampung Tua Tembesi Tower menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan: kehilangan hunian dan aset, gangguan mata pencaharian, disrupsi sosial, dan kebutuhan pemulihan jangka panjang. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya tata kelola pertanahan yang transparan, kompensasi yang adil, dan intervensi pemulihan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya impoverishment pasca-penggusuran.

Saran:

1. Pemerintah perlu menyediakan kompensasi dan lokasi relokasi yang layak bagi warga terdampak.
2. Perlu ada program pemberdayaan ekonomi pasca penggusuran agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi baru.
3. Diperlukan kebijakan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek penggusuran.

DAFTAR PUSTAKA

Ombudsman RI. (12 Februari 2025). 'Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi Terkait Maladministrasi Legalitas Lahan di Tembesi Tower, Batam.' (Siaran Pers)

Mongabay Indonesia. (16 Januari 2025). 'Nestapa Warga Kampung Tembesi, Digusur Demi Kawasan Industri.'

Batam Times. (8 Januari 2025). 'Kampung Tembesi Tower di Sagulung Akan Digusur, PT Tanjung Piayu Makmur Beri Empat Opsi Bagi Warga.'

Lenterakepri. (9 Januari 2025). '800 dari Seribu Lebih Bangunan di Tembesi Tower Sudah Ditertibkan Tim Terpadu Kota Batam.'

BP Batam e-PPID. (2024). Dokumen 'Penetapan Pemenang' dan dokumen PL terkait lahan Tembesi (dokumen publik).

Cernea, M. (1997). 'The risks and reconstruction model for resettling displaced populations.' World Development, 25(10), 1569-1587.

Lampiran A: Garis Waktu Peristiwa (Ringkasan)

19 Nov 2024 — Surat Peringatan (SP3) dilayangkan oleh Tim Terpadu kepada warga Tembesi Tower (laporan media).

8 Jan 2025 — Penertiban utama/pembongkaran pemukiman dilaksanakan (laporan Mongabay, BatamTimes).

9 Jan 2025 — Laporan-laporan media lokal menyebut ratusan hingga >1.000 bangunan terdampak; proses penertiban berlanjut.

12 Feb 2025 — Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi terkait maladministrasi dan rekomendasi pemulihan bagi warga Tembesi Tower.